

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN ( STUDI KASUS POLDA SULAWESI TENGAH)**

SITI ELMINAWATI/ D10112413

Pembimbing

- DR. JOHNNY SALAM,SH,MH
- NURHAYATI MARDIN, SH,MH

## **ABSTRAK**

*Pelanggaran Kesusilaan bagi anggota polri tidak bisa di hindari dalam kehidupannya selaku Makluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tingkah lakunya terikat atau tunduk dengan peraturan Kode Etik Profesi Polri namun masih didapati anggota Polri melakukan pelanggaran salah satunya adalah pelanggaran Kesusilaan. Pelanggaran Kesusilaan anggota Polri dapat di Proses melalui sidang Kode Etik maupun Sidang Peradilan Umum dan setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila pelanggaran Kesusilaan tersebut ancaman hukumannya 4 (empat) tahun maka bisa dilakukan proses PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat). Untuk itu setiap anggota polri harus menghayati dan mengamalkan Tribrata dan Catur Prasetya yang dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut; Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui penanganan pelanggaran Kesusilaan anggota Polri, kendala dan upaya dalam Penegakkan Pelanggaran Pidana bagi anggota polri yang melakukan Pelanggaran Kesusilaan di Polda Sulwaesi Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Artikel ini akan menjelaskan mengenai penanganan terhadap Polisi yang melanggar Tindak Pidana Kesusilaan di Polda Sulawesi Tengah.*

Kata kunci: Tindak Pidana kesusilaan, Anggota Polri, penegakkan Hukum

## **I.**

### **PENDAHULUAN**

keamanan dan ketertiban

#### **A. Latar Belakang Masalah**

masyarakat, menegakkan hukum,

Keberhasilan Pelaksanaan

melindungi, dan mengayomi

tugas polri dalam memelihara

masyarakat selain ditentukan oleh

kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis kepolisian yang tinggi guna mewujudkan sikap perilaku terpuji setiap anggota Polri, senantiasa dituntut menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian yang merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Setiap organisasi harus mempunyai pola penegakan disiplin bagi setiap pegawai yaitu dengan menciptakan peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh pegawai, menciptakan dan memberi sanksi-sanksi bagi pelanggar disiplin melalui pelatihan-pelatihan kedisiplinan yang terus menerus, pembinaan melalui pelatihan ini dapat berupa pelatihan fisik dengan memberikan pelatihan kepada

Polri dan pelatihan mental-spiritual yakni dengan cara ceramah agama dan psikologi.<sup>1</sup>

Perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat mempengaruhi kinerjanya sebagai anggota Polri sebagaimana Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penegakan hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Saydam. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Djambatan. Jakarta, 2000 Hlm. 200-202

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum*, hak Azazi Manusia dan penegakkan

Menurut Soerjono

Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>3</sup>

## **B. Rumusan**

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan kode Etik Profesi Polri bagi anggota Polri yang melakukan Pelanggaran Kesusilaan di Polda Sulteng?
2. Bagaimanakah proses Penyelesaian pelanggaran kesusilaan bagi anggota Polri di Polda Sulteng ?.

---

Hukum.Mandar Maju Bandung, 2001 hlm.55

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, efektifitas hukum dan penerapan sanksi Bandung Cv.Ramadja karya, 1988 hlm.80

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **B. PENGERTIAN KODE ETIK PROFESI POLRI DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK PROFESI POLRI.**

#### **1. Pengertian Kode Etik**

Menurut Bertens, *Pertama* kata “etika “ bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku . *kedua* “etika”

juga berarti asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini ialah Kode etik . *ketiga* , “etika” mempunyai arti ilmu tentang apa itu yang baik atau yang buruk . Secara sederhana dapat dipahami bahwa arti pertama dari etika menunjuk kepada suatu tatanan (disiplin) ajaran moral tertentu, tentang nilai yang baik dan nilai yang buruk. Arti kedua berbicara tentang nilai benar salah dalam suatu golongan bermasyarakat tertentu; suatu etika profesional atau tentang perilaku yang tidak etis dalam profesi tertentu misalnya ; etika profesi polri

.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Profesi Polri

<sup>4</sup> Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi Bumi aksara, 2005 hlm. 8

a. Profesi menurut keiser dalam adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.<sup>5</sup>

b. Polri adalah ; aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat.

## 3. Ruang Lingkup Kode Etik Profesi Polri

1. Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri

<sup>5</sup> Abdul Rohim, 2008 pengertian Etika Profesi serta Profesionalisme, (online) , <https://csagboyz.wordpress.com>, di akses tanggal 18 Oktober 2015

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.

2. Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

3. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang

senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

4. Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **C. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin

*delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbar feit* Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa<sup>6</sup>

Menurut Prof Dr Bambang Poernomo,SH perumusan mengenai perbuatan pidana adalah “ Suatu perbuatan yang oleh suatu aturan

hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Kesusilaan

Menurut kamus hukum, pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat<sup>8</sup>

### 3. Pelanggaran Kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum anggota Polri di Polda Sulteng

<sup>7</sup> Bambang Poernomo.1992.asas-asas hukum pidana.jakarta.Ghaliv Indonesia.hal.130

<sup>8</sup> Soedarso. Kamus Hukum.Jakarta:Rineka Cipta.1992. hlm. 64.

<sup>6</sup> Efendi, HUKUM PIDANA INDONESIA. PT Refika Aditama: Bandung, 2011,hlm.97

Anggota Polri apabila melakukan Pelanggaran Tindak Pidana kesusilaan dapat di hukum berdasarkan peraturan umum seperti halnya masyarakat atau warga sipil lainnya yang mana ia tunduk pada kekuasaan peradilan umum berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **D. FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

##### **1. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia**

Fungsi kepolisian republik indonesia meliputi dimensi yuridis dan sosiologis.

a. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi :

1. Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.

2. Fungsi kepolisian khusus, yang merupakan administrasi khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya .

b. Fungsi dalam dimensi sosiologis yaitu berupa rumusan fungsi kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

## **2. Tanggung Jawab Kepolisian Republik Indonesia.**

### **1. Pengertian Tanggung jawab**

#### **Pengertian**

tanggung jawab menurut kamus bahasa indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab, apabila di kaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang

harus di pikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.<sup>9</sup>

### **2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**

#### **Kepolisian**

Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

---

<sup>9</sup> Febiyanti Iskandar, 2012 Wewenang dan tanggung jawab, (online), <http://ebiyantiiskandar.blogspot.co.id>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2015



dirugikan akibat  
dikeluarkannya keputusan  
oleh Pejabat kepolisian  
selaku Pejabat Tata Usaha  
Negara.

rangka terpeliharanya  
keamanan dalam negeri.

3. **Peraturan yang mengikat anggota Polisi ketika melakukan Pelanggaran Kesusilaan antara lain :**

- a. Pelanggaran Berkaitan dengan perkara pidana bagi anggota kepolisian diselesaikan melalui peradilan umum, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Uimum Bagi Anggota Polri.
- b. Sengketa administrasi diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa yang dimaksud pihak-pihak yang merasa

- c. Berkaitan dengan pelanggaran disiplin melalui sidang disiplin, berdasar Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- d. Pelanggaran etika profesi dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Polri

4. **Pelaksanaan Penegakkan KEEP**

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Perkap No 14 tahun 2011 bahwa penegakkan KEPP bagi anggota Polri dilaksanakan oleh :

- a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;
- b. KKEP;
- c. Komisi Banding;
- d. pengemban fungsi hukum Polri;
- e. SDM Polri; dan
- f. Propam Polri bidang rehabilitasi personel.

Pelaksanaan penegakkan KEPP berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 tahun 2011 dilaksanakan melalui :

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan Hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel.

Mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh oknum Polisi di Polda Sulteng, penulis mendapat gambaran / informasi dari hasil

wawancara bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Kesusilaan yaitu antara lain :

1. Keimanan
2. Lingkungan sosial
3. Pergaulan
4. Teknologi
5. Peran Korban<sup>10</sup>

#### **5. Proses Penyelesaian pelanggaran kesusilaan bagi anggota Polri di Polda Sulteng.**

Pelanggaran oleh anggota Polri tentunya berakibat hukum, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia bagi Pelanggar Tindak Pidana Kesusilaan harus melalui beberapa Tahapan penegakan KEPP yang meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Akbp Drs Rais Adam (Kabidkum Polda Sulteng) pada tanggal 8 Oktober 2015

- e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel.

**6. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran kesusilaan Bagi Anggota Polisi Polda Sulawesi Tengah .**

Untuk mencegah terjadinya Pelanggaran Tindak Pidana Kesusilaan Selain Aturan yang mengikat Pimpinan Polisi baik langsung maupun tidak langsung sering memberi arahan dan penekanan terhadap anggota polisi di Polda Sulteng agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang yang bisa merusak martabat sebagai anggota Polri serta pemberian sanksi pada setiap pelanggaran, namun masih saja ada yang melakukan pelanggaran kesusilaan.

**7. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Kode Etik profesi Polri bagi anggota polri yang**

**melakukan Tindak Pidana Kesusilaan.**

1. Peraturan tentang Kode Etik Profesi Polri tidak tersedia penjelasan yang memadai, sehingga mengakibatkan peraturan yang multitafsir, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dari ahli hukum polri tentang Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
2. Seringnya terjadi perubahan aturan hukum intern dalam tubuh Polri.
3. Sulit memperoleh keterangan dari saksi dari masyarakat dan tidak ada sangksi hukum bagi saksi bila tidak memenuhi panggilan.
4. Pada umumnya istri anggota polri tidak berani

melaporkan suaminya yang melakukan pelanggaran kesusilaan karena konsekwensinya dapat mengakibatkan terjadinya pemecatan dan juga berpengaruh terhadap hubungannya yang dikhawatirkan berujung perceraian.

5. Tidak ada upaya paksa seperti proses pidana untuk panggilan terhadap terduga pelanggar apabila ia tidak hadir.
6. Adanya Faktor Psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk menonis PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) bagi anggota yang melanggar Kode Etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Polri telah melakukan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan kepribadian atau pelanggaran dengan cara melakukan bimbingan mental yang secara rutin dilaksanakan pada hari Kamis dan arahan-arahan atau penekanan –penekan setiap harinya oleh para pimpinan dengan harapan agar anggota Polri patuh terhadap hukum .
2. Anggota Polri harus mengetahui dan memahami kode etik profesi Polri dan melaksanakannya artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan

untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang professional serta dicintai rakyatnya dapat terlaksana. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri.

3. Pelanggaran Tindak Pidana kesusilaan bagi anggota Polri di Proses hukum melalui Peradilan Umum setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses Internal Polri Yaitu Preoses Kode Etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri. Jadi apabila anggota Polri melakukan tindak pidana Kesusilaan ia mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik .

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaran disiplin dan tindak pidana kesusilaan di lingkungan Polri sebagai berikut :

1. Anggota Polri sebagai insan Bhayangkara diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang berimplikasi positif terhadap pembentukan karakter yang berwibawa penuh pengendalian diri, tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang bersifat negatif dan merusak citra institusi Polri sebagai lembaga yang bertanggung terhadap keamanan dalam negeri.
2. Penempatan personil pada satuan kerja bidang profesi dan pengamanan pada Polda

Sulteng perlu mendapatkan perhatian paling tidak dibutuhkan personil yang profesional dan bertanggung jawab yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka memperbaiki mentalitas Polri melalui proses-proses hukum yang tegas.

3. Selain itu kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian bagi anggota Polri perlu menjadi sebuah atensi karena bagaimanapun setiap orang membutuhkan penyegaran kerohanian yang bisa membangkitkan keimanan dan keperdulian terhadap dinamika sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bambang Poernomo.1992.asas-asas hukum pidana.jakarta.Ghaliv Indonesia.
- Efendi, HUKUM PIDANA INDONESIA. PT Refika Aditama: Bandung 2011.
- Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi Bumi aksara,2005 .
- Soerjono Soekanto,efektifitas hukum dan penerapan sanksi Bandung Cv.Ramadja karya,1988 .
- Soedarso,Kamus Hukum rineka cipta jakarta,1992.
- Saydam. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Djambatan. Jakarta,2000
- Romli Atmasasmita,.Reformasi Hukum, hak Azazi Manusia dan penegakkan Hukum.Mandar Maju Bandung, 2001

### B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan teknis Institusional Peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan kepala Kepolisian Negara republik Indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode Etik kepolisian Negara Republik Indonesia

### **C. Internet**

Febiyanti Iskandar ,2012 Wewenang dan tanggung jawab , (online), <http://ebiyantiiskandar.blogspot.co.id>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2015, pukul 19.22 Wita.

Abdul Rohim, 2008 pengertian Etika Profesi serta Profesionalisme, (online) , <https://csagboyz.wordpress.com>, di akses tanggal 18 Oktober 2015, pukul 20.05 wita

## DATA PENULIS



Nama : Siti Elminawati

Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 12 September 1980

Alamat Rumah : Jln Dayodara Cpi IV Block C No 2 Mantikulore  
Kotamadya Palu

Email : [hscity80@gmail.com](mailto:hscity80@gmail.com)

No Telp/Hp : **082213112001**